

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pemerintah Desa Jayamukti dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan misi pemerintah pusat yang mempunyai program membangun Indonesia dari pinggiran, yang di realisasikan melalui Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 yang menjadikan Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam hal pengelolaan keuangan untuk memberdayakan masyarakat Desa. Dalam hal ini desa tidak lagi menjadi obyek pembangunan, tetapi harus menjadi subyek pembangunan.

Indonesia merupakan Negara yang multikultural dimana banyak sekali suku, budaya dan agama di dalamnya, luas Indonesia juga merupakan mayoritas wilayah perdesaan dimana banyak sekali penyebutan terhadap desa di setiap daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa tersebut belum dapat mewedahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8000 (delapan ribu) kelurahan. (redaksi sinar grafika, 2017:58).

Desa mempunyai kewenangan yang sangat besar baik dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat desa dituntut untuk menjadi lebih mandiri dalam hal pengembangan sumber daya alam ataupun peningkatan sumber daya manusianya. Oleh karena itu pemerintah pusat

melakukan kebijakan dengan memberikan anggaran kepada desa dengan jumlah anggaran yang sangat besar atau disebut juga dana desa (DD), yang jumlahnya berbeda untuk setiap desa tergantung tingkat populasi jumlah penduduk di desa tersebut.

Desa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan desanya masing-masing, karena anggaran desa untuk tahun 2017 sangat besar yakni Rp. 60 triliun yang langsung diberikan dari pusat kepada desa tanpa melalui perantara pemerintah daerah. Dengan jumlah anggaran yang sangat besar tersebut, desa dituntut untuk bisa lebih mandiri dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing. ([setjen.kemendes.go.id](http://setjen.kemendes.go.id). Dikutip tanggal 6 Maret 2018)

Di bawah undang-undang no 6 tahun 2014, pemerintahan desa harus bisa lebih inovatif dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan di desanya, oleh karena itu pemerintah pusat menyiapkan pendamping desa yang tersebar di setiap desa di seluruh Indonesia dengan mempunyai keahlian yang kompeten. Melihat kesiapan pemerintah Desa yang masih bisa dikatakan kurang siap dalam mengelola keuangan Desa dalam jumlah yang besar, oleh karena itu pendamping desa sangat diperlukan guna mendampingi pemerintah desa dalam membangun Desanya.

Pada dasarnya pembangunan harus bisa proporsional atau seimbang, antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur agar nantinya dapat menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini perlu adanya sinergi yang apik dari pelaksana tugas pemerintahan dan dari masyarakat desa itu sendiri, supaya nantinya semua masalah yang dihadapi dapat di musyawarahkan bersama dengan mementingkan kepentingan bersama-sama.

Di Desa Jayamukti peneliti melihat permasalahan Pemerintah Desa kurang dalam hal memberdayakan masyarakat, dimana anggaran untuk pemberdayaan masyarakat hanya berjumlah Rp.151 juta saja. Tentu anggaran tersebut masih dikatakan sangat kecil jika melihat Dana Desa yang didapat oleh pemerintah Desa Jayamukti mencapai Rp.842.485.850 juta untuk tahun 2017.

**Tabel 1.1**

**Rincian Anggaran di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>	<b>Rp.151.300.000</b>
1	Kegiatan Pelatihan Kapasitas kepala Desa dan Perangkat -Peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa -Pelatihan SISKUDES -Operasional guru diniah	Rp.18.720.000 Rp. 1.200.000 Rp. 6.000.000 Rp.11.520.000
2	Kegiatan Kp. KB (Keluarga Berencana) -Bantuan Kp KB -Sosialisasi -Penyuluhan KB -Pelatihan kader-kader/ Posyandu	Rp.5.040.000 Rp.1.440.000 Rp.1.200.000 Rp.1.200.000 Rp.1.200.000
3	Posyandu (kegiatan pembinaan kesehatan) -Kegiatan pembinaan gizi balita -Kegiatan pembinaan kesehatan masyarakat dan lansia -Kegiatan pembinaan kesehatan lingkungan	Rp.6.000.000 Rp.3.000.000 Rp.1.500.000 Rp.1.500.000
4	Peningkatan Kapasitas Masyarakat -Pelatihan kader pembangunan desa -Pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif	Rp.2.160.000 Rp.1.080.000 Rp.1.080.000
5	Kegiatan Operasional KPMD	Rp.1.200.000

	-Operasional ketu KPMD	Rp.600.000
	-Operasioal anggota KPMD	Rp.600.000
6	Kegiatan Operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK)	Rp.18.180.000
	-Operasioanal ketua TPK	Rp.780.000
	-Operasional anggota TPK	Rp.2.400.000
	Kegiatan Sosial	
	-Santunan yatim jompo dan kegiatan sosial lainnya	Rp.15.000.000
	-Penambahan modal bumdes	Rp.100.000.000

*Sumber: Peraturan Desa Jayamukti No 9 Tahun 2017.*

Dalam tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dibagi untuk beberapa program, mulai dari program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa dalam menjalankan roda Pemerintahan di Desa sampai dengan peningkatan kapasitas masyarakat di Desa Jayamukti.

Dari data yang terdapat pada tabel diatas dimana data tersebut merupakan rincian anggaran untuk pemberdayaan masyarakat, dapat kita lihat anggaran untuk peningkatan kapasitas masyarakat masih sangat kecil, terutama utuk pelatihan kelompok usaha produktif yang hanya berjumlah Rp.1.080.000 ribu untuk keseluruhan masyarakat di Desa Jayamukti.

Dengan melihat data tersebut bisa dikatakan bahwa Pemerintah Desa Jayamukti belum serius dalam mengadakan program pelatihan kerja atau peningkatan ekonomi produktif kepada masyarakat, karena jumlah tingkat populasi masyarakat di Desa Jayamukti cukup banyak dengan mayoritas tingkat pendidikan yang bisa dikatakan masih sangat rendah.

Jika di lihat dari total jumlah penduduk yang mencapai 4.509 orang, dimana dalam jumlah tersebut masih di dominasi oleh usia-usia produktif, maka dikatakatan angka tersebut masih sangat kecil untuk digunakan dalam memberdayakan masyarakat yang jumlahnya besar tersebut.

Harusnya Pemerintah Desa Jayamukti menganggarkan lebih besar untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan dalam hal keterampilan kerja agar dapat menciptakan para wirausahawan baru di Desa Jayamukti. Karena dengan menciptakan para wirausahwan baru, itu akan berpengaruh terhadap pendapatan asli Desa (PADes) di Desa Jayamukti dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Melihat infrastruktur di Desa Jayamukti bisa dikatakan cukup bagus, seharusnya ini dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan bisnis masyarakat di Desa Jayamukti. Karena dengan infrastruktur yang memadai akan menjadikan pola hubungan perdagangan antara kota dan Desa akan menjadi lebih lancar karena akses yang lebih mudah untuk dijangkau.

Melihat kultur mata pencaharian masyarakat di Desa Jayamukti sendiri kebanyakan berprofesi sebagai petani, harusnya pemerintah Desa melakukan pemberdayaan kepada para petani bagaimana cara bertani yang modern. Ditambah dengan melimpahnya hasil bumi seperti kelapa, sirsak, kedondong dan lain-lain serta manggis pada musim-musim tertentu saja, komoditas tersebut biasanya hanya dijual mentah saja dengan harga yang relatif lebih murah.

Dengan melimpahnya hasil alam tersebut harusnya Pemerintah Desa Jayamukti memberikan keterampilan kepada anak-anak muda dan ibu rumah

tangga yang tidak mempunyai kegiatan keseharian yang produktif, agar bisa membuat suatu produk yang menarik dari hasil alam tersebut. Sebagai contoh buah kedondong dimana pada saat-saat tertentu tidak laku dijual, itu bisa dibuat dan dikreasikan menjadi sesuatu produk yang menarik dengan nilai jual yang sangat tinggi jika sudah menjadi manisan kedondong.

Oleh karena itu pemerintah Desa harus bisa menjadikan anak muda dan ibu-ibu rumah tangga menjadi lebih produktif, dengan cara menggandeng LPMD, ibu-ibu PKK dan Karang Taruna supaya dapat berperan aktif dalam memberdayakan anak muda dan ibu-ibu rumah tangga di Desa Jayamukti dalam menciptakan sebuah lapangan pekerjaan baru. Tentu dengan berjalannya semua elemen yang ada dalam pemberdayaan masyarakat Desa, itu akan lebih mudah menjadikan masyarakat Desa menjadi lebih sejahtera.

Apalagi ditunjang dengan teknologi yang sudah semakin maju, tentu akan mempermudah dalam proses pemasaran suatu produk yang dihasilkan. Karena pada saat ini di Desa Jayamukti mayoritas masyarakatnya sudah melek terhadap teknologi dan perkembangan zaman, maka dari itu momentum seperti ini harus di manfaatkan secara maksimal dalam pembangunan dengan cara memberdayakan masyarakat.

Pembangunan tidak akan berhasil hanya dengan modal dan teknik saja. Kita harus membangun manusianya pula, supaya manusia ini mampu menyesuaikan pikiran dan tindakannya dengan dunia yang berkembang, supaya manusia juga mengerti mengenai hak-hak dan kewajibannya dalam Negara dan juga supaya dia mengembangkan rasa tanggung jawab dalam perbuatannya.

Jikalau dia tidak berbuat apa-apa, dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya: yaitu tidak berbuat apa-apa. (Jomo,1986:13).

Laju perkembangann atau pertumbuhan ekonomi desa umumnya berjalan sangat lambat. Adat istiadat yang merupakan hukum formal dan informal yang saling menjalin dan mengatur tata hidup desa juga ikut berkembang tetapi sangat lambat. Nilai-nilai dan ukuran serta pergeseran nilai di desa nyaris statis atau berkembang lambat. Hal ini mungkin terjadi karena kebanyakan desa Indonesia merupakan satu “desa artuarki” (daerah yang berdiri sendiri dan mencukupi hidupnya sendiri di desa tersebut) dalam ukuran mini keadaan demikian ini umumnya kita jumpai di Kalimantan dan Irian Jaya. (marbun, 1988:10).

Perkembangan di Desa cenderung sangatlah lambat, itu dikarenakan kebanyakan masyarakat Desa masih mempunyai pola pikir yang tradisional. Sebagai contoh ketika para petani melakukan aktivitas pertanian dimana ini merupakan mata pencaharian utama mereka, itu masih menerapkan pola pertanian tradisional yang tidak efisien, mereka bertani masih hanya untuk dikonsumsi sendiri saja.

Inilah yang harusnya menjadi acuan Pemerintah Desa Jayamukti dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari Dana Desa, dengan tujuan agar pola pikir masyarakat menjadi lebih maju sehingga nantinya dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Maka dari itu Dana Desa harus di manfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat Desa.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana pemanfaatan dana Desa untuk memberdayakan masyarakat di Desa Jayamukti?

## **C. Pembatasan Masalah**

Masalah yang diteliti dibatasi pada masalah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Jayamukti tahun 2017.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka tujuan penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Jayamukti tahun 2017.

## **E. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian tentang desa ini, dapat memberikan sumbangsih terhadap dunia ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai bahan kajian dikalangan akademisi perguruan tinggi dan didalam mata kuliah politik pemerintahan Desa.

2. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dan evaluasi bagi pemerintah pusat, pemerintah desa Jayamukti dan masyarakat Desa Jayamukti itu sendiri, sehingga nantinya dapat menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di realisasikan.

